

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti tercantum dalam perencanaan pembangunan jangka panjang sehingga peran serta dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta sangat diharapkan demi terjaganya kesinambungan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap, bertumpu dan bertujuan untuk mencapai Trilogi Pembangunan, yaitu a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, b) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, c) Stabilitas nasional dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan itu saling berkaitan dan saling memperkuat/mendukung satu sama lainnya. Unsur pemerataan dari pembangunan itu tercermin dalam delapan jalur pemerataan yaitu : (1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan, (2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, (3) Pemerataan pembagian pendapatan, (4) Pemerataan kesempatan kerja, (5) Pemerataan kesempatan berusaha, (6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan

khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita, (7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air dan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai piranti kebijaksanaan fiskal merupakan rincian rencana kegiatan operasional pemerintah dan pembangunan. Penyusunan anggaran dilakukan dengan cermat agar mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam struktur APBN terdapat pos-pos penerimaan negara yang terdiri dari:

1. Penerimaan Dalam Negeri (*Domestic Revenue*) yaitu:
  - a. Penerimaan Pajak (*Tax Revenue*):
    - a). Pajak Dalam Negeri ( *Domestic Taxes*) seperti:
      - a. Pajak Penghasilan (*Income Tax*)
      - b. Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*)
      - c. PBB (*Land and Building Tax*)
      - d. Cukai (*Excisses*)
      - e. Pajak Lainnya (*Other Tax*)
    - b.)Pajak Perdagangan Internasional ( *International Trade Tax*) seperti:
      - a. Bea Masuk (*Import Duties*)
      - b. Pajak Ekspor (*Exsport Tax*)
  - b. Penerimaan Bukan Pajak (*Non Tax Revenue*) :
  - c. Penerimaan Sumber Daya Alam (*Natural Resources*)
  - d. Bagian Laba BUMN (*Profit Transfer from SOE'e*)
  - e. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya (*Other Non Tax Revenue*)

## 2. Penerimaan Pembangunan

- a. Bantuan Program
- b. Bantuan Proyek

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada pos penerimaan negara dalam APBN kebijaksanaan fiskal yang mendasar yaitu:

1. Melakukan revisi atas APBN seperti pada APBN tahun 1998/1999 dalam mendukung stabilisasi kegiatan bidang ekonomi dan upaya pengendalian kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perekonomian nasional.
2. Kebijakan tingkat suku bunga deposito dan SBI yang cukup tinggi untuk menarik minat masyarakat menyimpan dananya di sektor perbankan.
3. Perubahan tarif pajak.
4. Peningkatan disiplin dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejalan dengan Undang-Undang No.20/1997.
5. Upaya privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara.

**Tabel 1. Perkembangan Kontribusi Laba BUMN terhadap Penerimaan Negara Periode 2007-2013 (dalam milyar rupiah)**

Sumber Penerimaan	2007 <sup>(1)</sup>	2008 <sup>(1)</sup>	2009 <sup>(1)</sup>	2010 <sup>(1)</sup>	2011 <sup>(1)</sup>	2012 <sup>(2)</sup>
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>490,988</b>	<b>658,701</b>	<b>619,922</b>	<b>723,307</b>	<b>873,874</b>	<b>1,016,237</b>
<b>Pajak Dalam Negri</b>	470,052	622,359	601,252	694,392	819,752	968,293
<b>Pajak Penghasilan</b>	238,431	327,498	317,615	357,045	431,122	513,650
<b>Pajak Pertambahan Nilai</b>	154,527	209,647	193,067	230,605	277,800	336,057
<b>Pajak Bumi dan Bangunan</b>	23,724	25,354	24,270	28,581	29,893	29,687
<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>	5,953	5,573	6,465	8,026	-1	-
<b>Cukai</b>	44,679	51,252	56,719	66,166	77,010	83,267
<b>Pajak Lainnya</b>	2,738	3,035	3,116	3,969	3,928	5,632
<b>Pajak Perdagangan Internasional</b>	20,936	36,342	18,670	28,915	54,122	47,944
<b>Bea Masuk</b>	16,699	22,764	18,105	20,017	25,266	24,738
<b>Pajak Ekspor</b>	4,237	13,578	565	8,898	28,856	23,206
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>215,120</b>	<b>320,604</b>	<b>227,174</b>	<b>268,942</b>	<b>331,472</b>	<b>341,143</b>
<b>Penerimaan Sumber Daya Alam</b>	132,893	224,463	138,959	168,825	213,823	217,159
<b>Bagian Laba BUMN</b>	23,223	29,088	26,050	30,097	28,184	30,777
<b>Penerimaan Bukan Pajak Lainnya</b>	56,873	63,319	53,796	59,429	69,361	72,799
<b>Pendapatan Badan Layanan Umum</b>	2,131	3,734	8,369	10,591	20,104	20,408
<b>Jumlah / Total</b>	<b>706,108</b>	<b>979,305</b>	<b>847,096</b>	<b>992,249</b>	<b>1,205,346</b>	<b>1,357,380</b>

*Catatan: Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka pembulatan*

1. LKPP
2. APBN-P
3. APBN

*Sumber: Departemen Keuangan*

Dari Tabel 1 dapat dilihat pada kolom bagi laba BUMN terhadap penerimaan negara, pada tahun 2007 BUMN berkontribusi sebesar 23,223 milyar rupiah dan

pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 5,785 milyar rupiah menjadi 29,008 milyar rupiah ,lalu pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 3,038 milyar rupiah menjadi 26,050 dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan kembali sebesar 30,097; pada tahun 2011 turun menjadi 28,184 lalu kembali naik pada tahun 2012 sebesar 30,777 milyar rupiah. Dapat disimpulkan bagi hasil laba BUMN terhadap penerimaan negara mengalami fluktuasi, salah satunya dikarenakan keadaan ekonomi Indonesia, faktor internal dan faktor eksternal BUMN serta kebijakan pemerintah.

**Tabel 2. Daftar Total Laba Perusahaan BUMN Tahun 2012**

No	Nama Perusahaan	Laba Total (Rp.)
1	PT Perusahaan Listrik Negara	Rp 7,19 triliun
2	PT Telkom Tbk	Rp 5,47 triliun
3	PT JAMSOSTEK	Rp 2,18 triliun
4	PT JASA RAHARJA	Rp 2,098 triliun
5	Perum Pegadaian	Rp 1,506 triliun
6	PT ASKES	Rp 1,43 triliun
7	PT Jasa Marga Tbk	Rp 1,31 triliun
8	PT TASPEN	Rp 578,79 miliar
9	PT JASINDO	Rp 261,47 miliar
10	PT Kereta Api Indonesia	Rp 250,44 miliar
11	PT Pos Indonesia	Rp 144,98 miliar
12	PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan	Rp 114,22 miliar
13	Perum Damri	Rp 46,77 miliar
14	PT Balai Pustaka	Rp 5,44 miliar

*Sumber. Finance.detik.com (2013)*

Sebagai salah satu BUMN yang merupakan wujud dari kebijakan pemerintah khususnya pada pemerataan pelayanan kesehatan yaitu PT. Jasa Raharja merupakan perusahaan negara yang memiliki kedudukan strategis dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan di bidang perasuransian khususnya asuransi sosial. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil objek penelitian PT.

Jasa Raharja dikarenakan perusahaan tersebut mencakup seluruh masyarakat umum dan dengan melihat *track record* kinerja yang cukup signifikan di perusahaan tersebut. Jika dilihat dari ruang lingkup asuransi maka Jasa raharja cukup tinggi total laba yang dihasilkan diatas PT. Jamsostek dan PT. Askes.

PT. Jasa Raharja ditunjuk pemerintah untuk menjadi penyelenggara program asuransi sosial yang melindungi masyarakat dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas. Sedangkan yang dimaksud dengan asuransi sosial menurut Undang-undang No.2 tahun 1992 pasal 1 ayat 3 adalah “*asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Asuransi sosial merupakan asuransi wajib (compulsory insurance) dan yang mewajibkan adalah pemerintah yang sah.*”

Pelaksanaan pemberian jaminan tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.33 tahun 1964 jo Peraturan pemerintah No.17 tahun 1965 tentang Dana Lalu Lintas Jalan. Di dalam pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan pengertian dari asuransi sebagai berikut: “*Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.*”

Selain sebagai institusi bisnis, PT. Jasa Raharja juga berfungsi sebagai agen pembangunan (*Agent of Development*). Sebagai agen pembangunan dibidang asuransi sosial, keberadaan PT. Jasa Raharja dimaksudkan agar mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya yang mendapat musibah kecelakaan penumpang umum maupun kecelakaan lalu lintas (pihak yang mengajukan santunan) dalam memperoleh hak atas dana santunan yang telah diberikan oleh pemerintah. Sedangkan sebagai institusi bisnis, PT. Jasa Raharja diharapkan dapat berorientasi laba dalam kegiatannya sehingga akan dapat menghasilkan keuntungan dengan layanan pemberian dana santunan kecelakaan yang dilakukan kepada masyarakat demi tetap terjaganya kelangsungan hidup perusahaan.

Sebagai perusahaan negara PT. Jasa Raharja juga melaksanakan kewajibannya kepada negara dengan memberikan sebagian laba perusahaannya kepada negara. Jumlah kontribusi PT. Jasa Raharja pada penerimaan negara terlihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Perkembangan Kontribusi Laba PT. Jasa Raharja terhadap Laba Usaha Negara Periode 2007-2012 (Rp. Juta).**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Kontribusi Laba Bukan Pajak PT. Jasa Raharja</b>	<b>Laba Usaha Negara (BUMN)</b>	<b>Kontribusi (%)</b>
2007	23.223	701.208	3.31
2008	29.088	540.416	5.35
2009	26.050	1.152.686	2.25
2010	30.097	1.389.942	2.16
2011	28.184	1.752.321	1.60
2012	30.777	2.098.385	1.46

*Sumber :Annual Report PT Jasa Raharja dan Statistik Indonesia (2012).*

Besarnya kontribusi laba PT. Jasa Raharja terhadap BUMN selama tahun 2007 hingga tahun 2012 mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini disebabkan tidak stabilnya laba usaha PT. Jasa Raharja. Pada tahun 2007 kontribusi yang diberikan sebesar Rp 23,223 milyar. Perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 2008 mengalami kenaikan kontribusi menjadi Rp 29,088 milyar. Penurunan terjadi pada tahun 2009 dan 2011 yaitu sebesar Rp 26,050 milyar dan Rp 28,154 , dan di tahun sesudahnya (2010 dan 2012) peningkatan menjadi Rp. 30,097 milyar dan Rp 30,777 milyar.

**Tabel 4. Perkembangan Total Laba PT. Jasa Raharja Periode 2007 – 2012(dalam juta rupiah).**

<b>Tahun</b>	<b>Biaya Usaha</b>	<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>Pajak Penghasilan</b>	<b>Total Laba Bersih</b>
2007	331.654	701.208	166.129	519.291
2008	365.075	540.416	201.739	318.594
2009	439.566	1.152.686	218.813	923.674
2010	536.184	1.389.942	261.465	1.114.973
2011	616.855	1.752.321	328.054	1.419.952
2012	689.443	2.098.385	398.625	1.694.618

Sumber :*Annual Report PT Jasa Raharja (2012)*

Perolehan laba PT. Jasa Raharja dari tahun 2007 sampai 2012 total laba yang diperoleh PT. Jasa Raharja mengalami fluktuatif. Pada tahun 2007 total laba bersih yang diperoleh Rp. 519,291 milyar. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2008 terjadi penurunan yang drastis, yaitu total laba bersih Rp 318,594 milyar.

Peningkatan yang cukup pesat terjadi pada periode 2009 yaitu pendapatan laba bersih perusahaan sebesar Rp 923,674 milyar. Selanjutnya terjadi kenaikan laba bersih secara berturut-turut dari tahun 2010–2012 yaitu sebesar Rp 1,115;



Rp.1,419; dan Rp 1,694 triliun. Keadaan ini sebagai akibat dari adanya perubahan jumlah pendapatan premi, pendapatan investasi dan pendapatan lain-lain yang cenderung mengalami peningkatan, walupun terdapat biaya yang dibebankan perusahaan, seperti biaya *underwriting* dan biaya usaha.

Pembagian total laba ditetapkan sebagai berikut:

- Deviden Pemegang Saham
- Gratifikasi yang ditetapkan
- Tintiem yang ditetapkan
- Cadangan Teknis
- Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi
- Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera.

- Deviden Pemegang Saham

Deviden merupakan bagi hasil atas laba yang diperoleh perusahaan. Besarnya deviden tergantung dari kepemilikan saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

- Gratifikasi yang ditetapkan

Pembagian laba juga digunakan untuk gratifikasi yang merupakan biaya jasa produksi yang ditetapkan.

- Tintiem yang ditetapkan

Penetapan tintiem ditujukan bagi pegawai PT. Jasa Raharja berupa pemberian bonus kepada pegawainya.

- Cadangan Teknis

Cadangan teknis terdiri dari cadangan umum dan cadangan tujuan.

Penggunaan laba pada cadangan umum lebih diarahkan kepada pencapaian tujuan perusahaan.

- Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

Sebagian dari laba perusahaan juga disalurkan kepada Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dan mitra binaan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.60/KMK 016/96 sebesar 1-3 persen.

- Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera

Salah satu kegiatan PT. Jasa Raharja yaitu dengan melakukan pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera dengan sebagian laba bersih perusahaan.

## **B. Permasalahan**

1. Apakah terjadi perbedaan yang signifikan antara kinerja (laba bersih) perusahaan BUMN sektor asuransi dengan rata-rata laba bersih perusahaan swasta sektor asuransi lainnya?
2. Apakah terjadi perbedaan yang signifikan antara kinerja (laba bersih) PT. Jasa Raharja dengan kinerja (laba bersih) perusahaan BUMN sektor asuransi lainnya?
3. Apakah terjadi perbedaan signifikan antara kinerja (laba bersih) PT. Jasa Raharja dengan kinerja (laba bersih) perusahaan swasta sektor asuransi lainnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat proporsionalitas laba bersih PT. Jasa Raharja dengan perusahaan sektor asuransi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan perusahaan sektor asuransi swasta.

#### **D. Hipotesis**

1. Kinerja (laba bersih) PT.Jasa Raharja berbeda secara signifikan apabila dibandingkan dengan kinerja (laba bersih) perusahaan sektor asuransi swasta di Indonesia.
2. Kinerja (laba bersih) PT.Jasa Raharja berbeda secara signifikan apabila dibandingkan dengan kinerja (laba bersih) perusahaan sektor asuransi BUMN di Indonesia.

#### **E. Sistematika Penulisan**

**BAB I.** Pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan dan sistematika penulisan

**BAB II.** Tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka pemikiran dan landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Teori- teori ini memberikan gambaran seperti yang telah dipaparkan pada kerangka pemikiran.

**BAB III.** Metode Penelitian yang menguraikan metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan perbandingan ratio tabel.

**BAB IV.** Pembahasan yang menguraikan pembahasan mengenai kontribusi laba PT. Jasa Raharja terhadap penerimaan negara.

**BAB V.** Simpulan dan Saran merupakan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan serta saran-saran sebagai pengembangan pemikiran terhadap masalah yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**